E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4306-4316
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Analisis Ketimpangan Akses Pendidikan antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia dalam Mendukung Pemerataan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

Farida Bilqis[1], Arik Anfasa Salsabil[2], Diana Hildianti[3], Nurdin[4]

[1,2,3,4] Program Studi Adminsitrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia
e-mail: faridabilqis@upi.edu[1], ariksalsabil@upi.edu[2], dianahildianti@upi.edu[3], nurdin_adpend@upi.edu[4]

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang ditandai oleh perbedaan infrastruktur pendidikan, distribusi guru, akses teknologi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab ketimpangan pendidikan, mengevaluasi implementasi kebijakan pemerataan pendidikan, serta mengkaji implikasinya terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan data statistik pendidikan. Analisis dilakukan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan ketimpangan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor geografis, sosial ekonomi, keterbatasan infrastruktur, distribusi guru yang tidak merata, dan kesenjangan digital menjadi penyebab utama ketimpangan pendidikan. Berbagai kebijakan pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Program Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, dan Digitalisasi Sekolah, telah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Ketimpangan pendidikan berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerataan pendidikan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan daerah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Kata kunci: Ketimpangan Pendidikan, Pemerataan Pendidikan, Wilayah Perkotaan, Wilayah Pedesaan, Indonesia Emas 2045

Abstract

Education is a basic right of every citizen and plays a vital role in human resource development. However, Indonesia still faces unequal access to education between urban and rural areas, characterized by differences in educational infrastructure, teacher distribution, access to technology, and socioeconomic conditions. This study aims to analyze the factors causing

educational inequality, evaluate the implementation of educational equity policies, and examine their implications for achieving the Golden Indonesia 2045. The study used a literature study method by reviewing various scientific journals, books, policy documents, and educational statistics. The analysis was conducted using content analysis techniques to identify key themes related to educational inequality. The results of the study indicate that geographic factors, socioeconomic factors, limited infrastructure, uneven teacher distribution, and the digital divide are the main causes of educational inequality. Various government policies, such as the Smart Indonesia Program, School Operational Assistance, the Teacher Leader Program, the School Leader Program, and School Digitalization, have contributed to increasing access to education, although their implementation still faces various obstacles. Educational inequality has the potential to hinder the improvement of human resource quality and the achievement of Golden Indonesia 2045. Therefore, a sustainable and regionally-based educational equity strategy is needed to realize inclusive and quality education.

Keywords: Educational Inequality, Educational Equity, Urban Areas, Rural Areas, Indonesia Emas 2045

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi faktor utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Secara konstitusional, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pendidikan menjadi sektor strategis dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan pemerintah sebagai arah pembangunan nasional jangka panjang pada satu abad kemerdekaan Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia Emas 2045 diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang berdaulat, maju, adil, dan makmur melalui peningkatan kualitas manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Bappenas, 2023).

Meskipun berbagai program pembangunan pendidikan telah dilaksanakan, ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan yang signifikan di Indonesia. Wilayah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik yang berkualitas, serta

teknologi informasi dan komunikasi. Sebaliknya, wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti minimnya fasilitas pendidikan, distribusi guru yang tidak merata, dan rendahnya akses internet. Data Statistik Pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indikator pendidikan di wilayah perkotaan secara umum lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan, baik dari aspek angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, maupun akses terhadap teknologi pendidikan (BPS, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kintamani dan Hermawan (2012), ketimpangan akses pendidikan sering kali dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, sosial, dan keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan kelompok masyarakat di daerah terpencil mengalami hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan yang setara. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah akan semakin melebar dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Meskipun berbagai kebijakan pemerataan pendidikan telah dilaksanakan, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur, distribusi guru, dan disparitas pembangunan antarwilayah (Suryadi, 2020). Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut penting dilakukan untuk mendukung pemerataan pendidikan yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pemerataan pendidikan, akses pendidikan, dan kesenjangan wilayah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek deskriptif mengenai kondisi pendidikan atau evaluasi program tertentu. Penelitian yang secara khusus mengaitkan ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kedudukan sebagai kajian yang berupaya mengintegrasikan isu ketimpangan pendidikan, pemerataan akses pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka pencapaian Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu administrasi pendidikan serta menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pemerataan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur *(literature review).* Menurut Creswell, studi literatur berfungsi untuk membangun landasan teoritis, mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), serta mengembangkan kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam menjelaskan suatu permasalahan penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, laporan penelitian, publikasi resmi pemerintah, dokumen kebijakan pendidikan, serta data statistik pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, UNESCO, dan Bappenas. Literatur yang digunakan difokuskan pada publikasi periode 2020–2025 agar sesuai dengan

perkembangan terkini mengenai ketimpangan akses pendidikan, pemerataan pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi *(content analysis).* Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi dari berbagai sumber informasi berdasarkan konteks penggunaannya. Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi literatur, seleksi literatur berdasarkan relevansi topik, pengelompokan tema-tema utama, interpretasi temuan, dan penyusunan sintesis hasil penelitian. Fokus analisis diarahkan pada kondisi ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, faktor penyebab ketimpangan, efektivitas kebijakan pemerataan pendidikan, serta implikasinya terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Akses Pendidikan antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pendidikan nasional yang bertujuan menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Namun, hingga saat ini ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan yang cukup serius dalam sistem pendidikan Indonesia. Ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat pada aspek ketersediaan lembaga pendidikan, tetapi juga pada kualitas layanan pendidikan, sarana dan prasarana sekolah, kompetensi tenaga pendidik, akses teknologi, serta capaian hasil belajar peserta didik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang berada di wilayah perkotaan cenderung memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik dibandingkan peserta didik di wilayah pedesaan.

Data pendidikan nasional menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 16–18 tahun di wilayah perkotaan mencapai 80,91%, sedangkan di wilayah pedesaan hanya sebesar 73,30%. Pada jenjang pendidikan tinggi, kesenjangan yang terjadi bahkan lebih besar. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di wilayah perkotaan mencapai 38,58%, sementara di wilayah pedesaan hanya sebesar 23,14%. Data tersebut menunjukkan bahwa peluang masyarakat pedesaan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih jauh tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan.

Selain perbedaan akses terhadap lembaga pendidikan, kesenjangan juga terjadi pada kualitas proses pembelajaran. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki lingkungan belajar yang lebih kondusif, fasilitas pembelajaran yang lebih lengkap, serta dukungan teknologi yang lebih baik. Sebaliknya, sekolah di wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan perangkat teknologi pendidikan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembelajaran berjalan kurang optimal dan berdampak pada rendahnya capaian akademik peserta didik.

Penelitian Fadillah, Desmaryani, dan Lestari (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di daerah pedesaan masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi mutu pendidikan. Banyak sekolah di wilayah pedesaan menghadapi

keterbatasan ruang belajar yang layak, minimnya fasilitas teknologi informasi, serta rendahnya dukungan infrastruktur pendidikan. Akibatnya, motivasi belajar peserta didik menurun dan guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran secara efektif.

Faktor Penyebab Ketimpangan Pendidikan antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan

1. Faktor Geografis

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan karakteristik wilayah yang beragam menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan akses pendidikan. Banyak daerah pedesaan berada di wilayah pegunungan, kepulauan terpencil, perbatasan negara, maupun daerah dengan akses transportasi yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik, serta penyediaan fasilitas pembelajaran menjadi lebih sulit dibandingkan wilayah perkotaan.

Menurut penelitian Wahyuni dan Kurniawan (2023), hambatan geografis menyebabkan tingginya biaya operasional pendidikan dan memperlambat distribusi layanan pendidikan ke daerah-daerah terpencil. Akibatnya, banyak peserta didik di pedesaan harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah, bahkan beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan jumlah satuan pendidikan pada jenjang tertentu.

2. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi akses pendidikan. Keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya transportasi, pembelian buku, perangkat digital, hingga biaya pendidikan lanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2020) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di wilayah pedesaan berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Banyak peserta didik di daerah pedesaan yang memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan.

3. Faktor Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan merupakan komponen penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif. Ketersediaan ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, fasilitas sanitasi, jaringan internet, serta media pembelajaran menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas layanan pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah perkotaan memiliki fasilitas pendidikan yang jauh lebih lengkap dibandingkan sekolah di wilayah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan peserta didik di daerah perkotaan memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih mendukung pengembangan kompetensi abad ke-21.

4. Faktor Distribusi Guru

Guru merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, distribusi guru di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah perkotaan umumnya memiliki jumlah guru yang lebih banyak serta kualifikasi akademik yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah terpencil sering mengalami kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Teknologi Informasi.

Menurut teori *Educational Effectiveness*, kualitas guru merupakan faktor sekolah yang paling berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, ketimpangan distribusi guru secara langsung berdampak terhadap kualitas pendidikan. Selain jumlah guru, permasalahan juga terjadi pada aspek kompetensi dan profesionalisme. Banyak guru di daerah terpencil memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan harus mencakup pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik.

5. Faktor Teknologi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma pendidikan secara global. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan berbasis sumber belajar yang luas. Namun, transformasi digital juga memunculkan fenomena *digital divide* atau kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah perkotaan umumnya memiliki akses internet yang lebih baik, perangkat teknologi yang lebih lengkap, serta literasi digital yang lebih tinggi. Sebaliknya, banyak sekolah di wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, perangkat komputer, serta kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.

Menurut laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2023), kesenjangan digital berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, kemampuan digital menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki generasi muda. Oleh karena itu, pemerataan akses teknologi pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

6. Faktor Tata Kelola dan Kebijakan Pendidikan

Faktor terakhir yang memengaruhi ketimpangan pendidikan adalah tata kelola dan implementasi kebijakan pendidikan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pendidikan Indonesia, berbagai program pemerataan pendidikan sering kali menghadapi kendala berupa koordinasi antarinstansi yang belum optimal, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan lapangan. Akibatnya, berbagai program pendidikan belum sepenuhnya mampu mengurangi ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan

Salah satu kebijakan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar berkontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah, khususnya pada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Namun demikian, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketepatan sasaran penerima bantuan.

Dalam perspektif Edwards III, aspek komunikasi masih menjadi tantangan karena sosialisasi program belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Selain itu, meskipun sumber daya finansial tersedia dalam jumlah yang cukup besar, mekanisme pengawasan dan validasi data penerima bantuan masih belum optimal. Disposisi atau komitmen pelaksana program di tingkat daerah juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan sehingga memengaruhi efektivitas implementasi. Di sisi lain, struktur birokrasi yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan sering kali menyebabkan proses koordinasi dan penyaluran bantuan menjadi kurang efektif.

Selain Program Indonesia Pintar, pemerintah juga melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus mendukung operasional sekolah. Program BOS terbukti berhasil meningkatkan akses pendidikan dasar dan mengurangi hambatan ekonomi bagi peserta didik. Namun demikian, keberhasilan program ini belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki kapasitas manajemen yang lebih baik dalam mengelola dana BOS dibandingkan sekolah di daerah pedesaan dan daerah tertinggal. Akibatnya, manfaat program tidak selalu menghasilkan dampak yang sama pada setiap wilayah. Dari perspektif implementasi kebijakan, perbedaan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas program BOS dalam mendukung pemerataan pendidikan.

Kebijakan sistem zonasi juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Sistem zonasi dirancang untuk mendistribusikan peserta didik secara lebih merata sehingga tidak terjadi konsentrasi peserta didik berprestasi pada sekolah-sekolah tertentu. Kebijakan ini memiliki tujuan yang positif karena berupaya menghilangkan stigma sekolah favorit dan mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Namun demikian, implementasi sistem zonasi masih menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat. Hal ini terjadi karena kualitas sekolah di berbagai wilayah belum sepenuhnya merata. Dalam kondisi tersebut, kebijakan zonasi sering kali dianggap membatasi pilihan masyarakat tanpa disertai peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh. Oleh karena itu, efektivitas sistem zonasi sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara merata di seluruh wilayah.

Program Guru Penggerak dan Digitalisasi Sekolah memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran melalui penguatan kompetensi guru dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Namun, implementasinya belum merata karena masih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki kesiapan sumber daya dan infrastruktur yang lebih baik. Keterbatasan akses internet, perangkat teknologi, serta kapasitas guru di daerah pedesaan menjadi tantangan utama dalam pemerataan manfaat program tersebut.

Dalam konteks pemerataan pendidikan, Program Afirmasi Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) merupakan kebijakan yang memiliki peran strategis. Program ini bertujuan memperkuat akses dan kualitas pendidikan di wilayah yang menghadapi berbagai keterbatasan geografis, ekonomi, dan sosial. Melalui program afirmasi, pemerintah berupaya menyediakan tenaga pendidik, sarana pendidikan, serta dukungan pembelajaran yang lebih memadai bagi daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya,

pergantian kebijakan, serta keberlanjutan program. Oleh karena itu, penguatan komitmen pemerintah dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan program afirmasi dalam mendukung pemerataan pendidikan nasional.

Implikasi Ketimpangan Pendidikan terhadap Indonesia Emas 2045

Dalam perspektif *Human Capital Theory* yang dikemukakan oleh Gary Becker (1993), pendidikan dipandang sebagai investasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tidak hanya menjadi persoalan sektor pendidikan semata, tetapi juga berimplikasi luas terhadap keberhasilan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Ketimpangan pendidikan berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Peserta didik yang memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan kerja, kemampuan berpikir kritis, dan literasi digital yang dibutuhkan pada abad ke-21. Sebaliknya, keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedesaan berpotensi menghasilkan kesenjangan kompetensi antarwilayah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul yang menjadi fondasi utama Indonesia Emas 2045.

Selain berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia, ketimpangan pendidikan juga memengaruhi produktivitas ekonomi. Pendidikan yang berkualitas berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan dan kemampuan kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas individu maupun produktivitas nasional. Sebaliknya, rendahnya kualitas pendidikan akan menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi yang terbatas sehingga mengurangi kemampuan bersaing dalam pasar kerja modern. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat karena kualitas modal manusia yang belum optimal.

Ketimpangan pendidikan juga berkaitan erat dengan pemanfaatan bonus demografi yang sedang dialami Indonesia. Bonus demografi merupakan kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Kondisi tersebut hanya akan menjadi keuntungan apabila penduduk usia produktif memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai. Jika ketimpangan pendidikan terus berlangsung, maka bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban pembangunan karena sebagian besar penduduk usia produktif tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, kualitas pendidikan juga menentukan daya saing suatu bangsa. Negara-negara yang berhasil membangun sistem pendidikan yang merata dan berkualitas cenderung memiliki tingkat inovasi, produktivitas, dan daya saing yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketimpangan pendidikan dapat menyebabkan sebagian masyarakat tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan Indonesia dalam bersaing di tingkat regional maupun global.

Lebih lanjut, ketimpangan pendidikan dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Pendidikan yang tidak merata akan menghasilkan perbedaan kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan kualitas hidup masyarakat. Akibatnya,

pembangunan menjadi tidak inklusif dan kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin sulit dikurangi. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan harus dipandang sebagai strategi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Strategi Pemerataan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

Salah satu strategi yang perlu diprioritaskan adalah pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis kebutuhan daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa sekolah-sekolah di wilayah pedesaan memiliki fasilitas yang setara dengan sekolah di wilayah perkotaan, termasuk ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, sarana sanitasi, serta akses internet yang memadai. Pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan daerah penting dilakukan karena karakteristik dan tantangan yang dihadapi setiap wilayah berbeda-beda. Selain pembangunan infrastruktur, pemerataan distribusi guru juga harus menjadi prioritas kebijakan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan redistribusi guru serta memberikan insentif yang memadai bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Insentif tersebut tidak hanya berupa tunjangan finansial, tetapi juga kesempatan pengembangan karier, pelatihan profesional, dan dukungan kesejahteraan yang memadai.

Transformasi digital pendidikan juga perlu dipercepat melalui pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih merata. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh sekolah memiliki akses terhadap internet, perangkat pembelajaran digital, serta sumber belajar berbasis teknologi. Di samping itu, peningkatan kompetensi digital guru dan peserta didik perlu dilakukan secara sistematis agar transformasi digital dapat memberikan dampak yang optimal terhadap kualitas pembelajaran.

Dalam aspek pendanaan, diperlukan model pembiayaan pendidikan yang lebih berorientasi pada kebutuhan daerah. Daerah dengan tingkat ketertinggalan yang lebih tinggi seharusnya memperoleh dukungan anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah yang telah berkembang. Pendekatan ini penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan pendidikan antarwilayah dan mempercepat proses pemerataan pendidikan nasional. Upaya pemerataan pendidikan juga memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan beasiswa, pengembangan infrastruktur pendidikan, program penguatan literasi digital, serta berbagai bentuk dukungan lainnya yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah tertinggal.

Penguatan program afirmasi pendidikan di wilayah 3T perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Program afirmasi harus difokuskan pada peningkatan akses pendidikan, penguatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas pendidikan, serta pemberian dukungan khusus bagi peserta didik yang berasal dari kelompok rentan. Dengan demikian, kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi dapat dikurangi secara lebih efektif. Terakhir, pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan yang terintegrasi dan berbasis data. Pemanfaatan data pendidikan yang akurat akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi wilayah yang masih tertinggal, mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan, serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan dukungan

sistem monitoring yang kuat, proses pemerataan pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

SIMPULAN

Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial ekonomi, infrastruktur pendidikan, distribusi guru, dan akses teknologi yang belum merata. Meskipun berbagai kebijakan pemerintah telah meningkatkan akses pendidikan, implementasinya masih perlu diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara setara di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, E. N., Ma'wa, R. J., Suprapto, F. A., & Prabawati, I. (2026). Analisis Ketimpangan Akses Pendidikan Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia Dalam Mendukung SDG 4. *Indonesian Journal Of Innovation Multidisciplinary Research*, 4(2), 1927–1936.

Arifin, M., & Maulana, R. (2024). Digitalisasi Sekolah Dan Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 31(1), 45–61.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Indonesia Emas 2045: Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Adil, Dan Makmur*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Pendidikan Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical And Empirical Analysis With Special Reference To Education* (3rd Ed.). Chicago: The University Of Chicago Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (5th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Eskasasnanda, I. D. P., & Dwiningrum, S. I. A. (2023). Kesetaraan Pendidikan: Memahami Kompleksitas Konsep Sederhana. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 10(2), 162–173.

Fadillah, R., Desmaryani, S., & Lestari, N. (2025). Ketimpangan Sarana Pendidikan Antara Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 88–103.

Hidayati, N. (2022). Efektivitas Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Keluarga Miskin. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 13(2), 115–128.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. (2023). *Laporan Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2023*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kintamani, I., & Hermawan, D. (2012). The Performance Of Equality Education As A Type Of Non-Formal Education. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(1), 65–84.

Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction To Its Methodology* (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nugroho, A. (2023). Evaluasi Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Mendukung Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 15(1), 33–47.

Organisation For Economic Co-Operation And Development. (2023). *Equity And Inclusion In Education: Finding Strength Through Diversity*. Paris: OECD Publishing.

Prasetyo, A., & Hidayat, R. (2023). Distribusi Guru Dan Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan Di Daerah Pedesaan Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 18(2), 140–154.

Rahman, M., & Supriyadi, T. (2022). Educational Inequality In Indonesia: Challenges And Policy Responses. *Journal Of Educational Development Studies*, 7(1), 25–39.

Sari, D., Nugraha, E., & Putri, N. (2024). Infrastruktur Pendidikan Dan Kualitas Pembelajaran Di Daerah Pedesaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 10(1), 45–59.

Situmorang, H., & Harahap, M. (2022). Educational Policy Implementation And Inequality In Rural Areas. *Journal Of Education Policy Studies*, 14(3), 201–218.

Suharto, E., & Firmansyah, D. (2021). Socioeconomic Determinants Of Educational Participation In Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 101–115.

Suryadi, A. (2020). *Pendidikan Indonesia Menuju 2045*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suryana, Y., & Permatasari, D. (2024). Analisis Kesenjangan Digital Pendidikan Antara Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(1), 55–72.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization. (2024). *Global Education Monitoring Report 2024: Technology In Education*. Paris: UNESCO Publishing.

Wahyuni, R., & Kurniawan, A. (2023). Geographical Barriers And Educational Inequality In Rural Indonesia. *Indonesian Journal Of Educational Studies*, 11(2), 88–102.

Yusuf, M., & Hasanah, U. (2023). Human Capital Development And Educational Equality In Indonesia. *International Journal Of Educational Development*, 97, 102719.